



**DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA
BATAM**

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2026





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

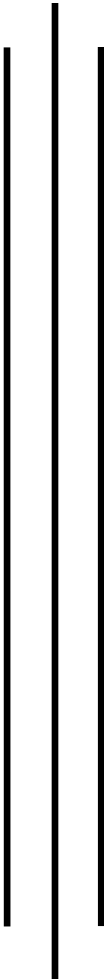
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XXXI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 - 2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 21 Agustus 2026
Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Batam



Drs. Ardiwinata
Pembina Utama Muda
NIP.19690629 198909 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang Perubahan..... 5

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II..... 9

EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026..... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 17

BAB III 18

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 18

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 18

BAB IV PENUTUP 30

4.1 Catatan Penting 30

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 30

4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.....11

Table 2 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN I Error! Bookmark not defined.

Tabel 3 rincian usulan alokasi anggaran perubahan APBD 202621

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;

b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Tahun 2021 - 2026
8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya (2025) untuk menjadi landasan dan pedoman penetapan indikator kinerja serta pagu indikatif pada tahun 2026.

Tujuan:

1. Merumuskan rencana pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahun ke depan.
2. Mensinergikan program perangkat daerah dengan dokumen RPJMD Kota Batam 2025-2029.
3. Mengidentifikasi masalah, tantangan, dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
 - a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Permuseuman
 - a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

6. Program Pemasaran Pariwisata
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 2. Program Pengembangan Kebudayaan
 - a. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

NIHIL

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut adalah proyeksi target kinerja pelayanan yang perlu disesuaikan dan dipertahankan pada tahun 2026:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2026	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (%) (n)
			4 K	5 K	6 K	7 K(%)
2.22.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	Nilai	73.53	-		
2.22.01.2.01 ~ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Persentase;	20.00	-		
2.22.01.2.01.0001 ~ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :: RUMUS TA	Dokumen;	1.00			
2.22.01.2.01.0007 ~ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :: RUMUS TA	Laporan;	1.00			
2.22.01.2.05 ~ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase;	100.00	72.77	72.77	72.77
2.22.01.2.05.0009 ~ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :: RUMUS TA	Orang;	6.00	3.00	3.00	50.00
2.22.01.2.06 ~ Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase;	100.00	50.49	50.49	50.49
2.22.01.2.06.0002 ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan :: RUMUS TA	Paket;	1.00	1.00	1.00	100.00
2.22.01.2.06.0003 ~ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan :: RUMUS TA	Paket;				
2.22.01.2.06.0004 ~ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan :: RUMUS TA	Paket;	1.00			
2.22.01.2.06.0005 ~ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan :: RUMUS TA	Paket;	1.00			
2.22.01.2.06.0006 ~ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan :: RUMUS TA	Dokumen;	1.00	2.00	2.00	100.00
2.22.01.2.06.0009 ~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :: RUMUS TA	Laporan;	1.00	1.00	1.00	100.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2026	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (%) (n)
			4 K	5 K	6 K	7 K(%)
2.22.01.2.07 ~ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase;	100.00	92.18	92.18	92.18
2.22.01.2.07.0001 ~ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan :: RUMUS TA	Unit;	1.00	1.00	1.00	100.00
2.22.01.2.07.0002 ~ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan :: RUMUS TA	Unit;				
2.22.01.2.07.0005 ~ Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan :: RUMUS TA	Unit;				
2.22.01.2.07.0006 ~ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan :: RUMUS TA	Unit;	10.00		10.00	100.00
2.22.01.2.08 ~ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persentase;	100.00	31.74	31.74	31.74
2.22.01.2.08.0002 ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan :: RUMUS TA	Laporan;	4.00	2.00	2.00	50.00
2.22.01.2.08.0004 ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan :: RUMUS TA	Laporan;	1.00	1.00	1.00	100.00
2.22.01.2.09 ~ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase;	100.00	3.59	3.59	3.59
2.22.01.2.09.0001 ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya :: RUMUS TA	Unit;	1.00	1.00	1.00	100.00
2.22.01.2.09.0002 ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya :: RUMUS TA	Unit;	3.00	3.00	3.00	100.00
2.22.01.2.09.0006 ~ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara :: RUMUS TA	Unit;	5.00	5.00	5.00	100.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2026	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (%) (n)
1	2	3	4 K	5 K	6 K	7 K(%)
2.22.01.2.09.0009 ~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi :: RUMUS TA	Unit;	1.00	1.00	1.00	100.00
2.22.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Nilai	90.77	-		
2.22.01.2.02 ~ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase;	100.00	34.55	34.55	34.55
2.22.01.2.02.0001 ~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN :: RUMUS TA	Orang/bulan;	71.00	69.00	69.00	97.18
2.22.01.2.02.0002 ~ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN :: RUMUS TA	Dokumen;				
2.22.01.2.02.0003 ~ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD :: RUMUS TA	Dokumen;	1.00			
2.22.02 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan	%	22.22	22,22	22.00	99.01
2.22.02.2.01 ~ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	Persentase;	20.00	17.89	17.89	89.45
2.22.02.2.01.0001 ~ Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan :: RUMUS TA	Objek;	4.00	2.00	2.00	50.00
2.22.02.2.01.0002 ~ Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan :: RUMUS TA	Orang;	50.00			
2.22.02.2.02 ~ Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Seni Budaya	Kegiatan;	10.00	94.99	94.99	100.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2026	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (%) (n)
			4	5	6	7
1	2	3	K	K	K	K(%)
2.22.02.2.02.0001 ~ Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan :: RUMUS TA	Objek;	1.00			
2.22.02.2.02.0002 ~ Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional :: RUMUS TA	Laporan;	1.00	1.00	1.00	100.00
2.22.02.2.02.0003 ~ Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan :: RUMUS TA	Sertifikat;				
2.22.02.2.03 ~ Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	Lembaga Adat;	1.00	100.00	100.00	100.00
2.22.02.2.03.0002 ~ Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina :: RUMUS TA	Orang;	2.00		2.00	100.00
2.22.05 ~ PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat provinsi	%	35.71	-		
2.22.05.2.01 ~ Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat kota	Persentase;	42.00	-		
2.22.05.2.01.0002 ~ Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan :: RUMUS SUM	Objek;	2.00	1.00	1.00	50.00
2.22.05.2.02 ~ Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang telah ditetapkan	Persentase;	20.00	-		
2.22.05.2.02.0001 ~ Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi :: RUMUS TA	Objek;				
2.22.06 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pertumbuhan pengunjung museum	%	9.79	2.00	2.00	20.43
2.22.06.2.01 ~ Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Museum	Kunjungan;	21,146.00	1,262.00	1,262.00	5.97
2.22.06.2.01.0001 ~ Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu :: RUMUS TA	Unit;				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2026	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (%) (n)
			4	5	6	7
1	2	3	K	K	K	K(%)
2.22.06.2.01.0002 ~ Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya :: RUMUS SUM	Orang;	50.00	50.00	50.00	100.00
2.22.06.2.01.0004 ~ Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara :: RUMUS TA	Unit;	1.00	1.00	1.00	100.00
2.22.06.2.01.0005 ~ Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi :: RUMUS SUM	Unit;	1.00			
2.22.06.2.01.0014 ~ Pengelolaan Operasional Museum	:: RUMUS TA	;	1.00	1.00	1.00	100.00
3.26.02 ~ PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar	%	36.10	12.00	12.00	33.24
3.26.02.2.01 ~ Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	Persentase;	35.00	-		
3.26.02.2.01.0006 ~ Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota :: RUMUS TA	Lokasi;	1.00			
3.26.02.2.01.0008 ~ Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan :: RUMUS TA	Orang;				
3.26.02.2.03 ~ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Persentase;	36.00	28.53	28.53	79.25
3.26.02.2.03.0007 ~ Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota :: RUMUS TA	Lokasi;	19.00	9.00	9.00	47.37
3.26.02.2.03.0010 ~ Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota :: RUMUS TA	Laporan;	1.00		1.00	100.00
3.26.02.2.04 ~ Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Laporan;	-			
3.26.03 ~ PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan	%	57.35	10.00	10.00	17.44

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2026	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (%) (n)
			4	5	6	7
1	2	3	K	K	K	K(%)
3.26.03.2.01 ~ Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata berkualitas yang dipasarkan	DESTINASI;	238.00			
3.26.03.2.01.0004 ~ Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri :: RUMUS TA	Dokumen;	1.00			
3.26.03.2.01.0006 ~ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri :: RUMUS TA	Kegiatan;	1.00	1.00	1.00	100.00
3.26.03.2.01.0007 ~ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri :: RUMUS TA	Promosi;	1.00	1.00	1.00	100.00
3.26.05 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	%	12.05	3.00	3.00	24.90
3.26.05.2.01 ~ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual (%)	Persentase;	48.00	5.00	5.00	10.42
3.26.05.2.01.0005 ~ Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif :: RUMUS TA	Laporan;	1.00		1.00	100.00
3.26.05.2.01.0006 ~ Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif :: RUMUS TA	Orang;	11.00	100.00	100.00	100.00

2.2 Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

No	Indikator Kinerja Pelayanan	Satuan	Target 2026	2026 TW II
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	21,43	-69.84
2	Persentase Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif	Persentase	12,05	5.57
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Indeks	90,95	38.22
4	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	persentase	42,86	33.83
5	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap objek budaya tak benda	persentase	33.33	26.31

2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

- **Urusan Kebudayaan:** Kurangnya sertifikasi SDM di bidang Cagar Budaya, minimnya digitalisasi database Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), serta perlunya peningkatan fasilitas taman budaya.
- **Urusan Pariwisata:** Kota Batam belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sehingga indeks pariwisata tidak terpenuhi, Kebutuhan riset pasar yang lebih komprehensif, optimalisasi branding "Batam Tourism" di kancah mancanegara, serta peningkatan konektivitas akses antar pula

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Pengembangan Kebudayaan
 - c. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
 - d. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
 - e. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - b. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Cagar Budaya
3. Program Pengelolaan Permuseuman
 - b. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
 - 1) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman

- 2) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
 - 3) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
 - 4) Pengelolaan Operasional Museum
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - c. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 1) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 6. Program Pemasaran Pariwisata
 - b. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - 2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 3) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - b. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - 1) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
 - 2) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Tabel 1 rincian usulan alokasi anggaran perubahan APBD 2026

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA BATAM TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SESUDAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						42.368.261.323,00	40.609.095.134,00	-1.759.166.189,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						35.108.148.447,00	32.603.022.063,00	-2.505.126.384,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						35.108.148.447,00	32.603.022.063,00	-2.505.126.384,00	
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan (Dengan Satuan:Persentas e)	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan (Dengan Satuan:Persentas e)	20 Persen	22.22 Persen	13.568.300.600,00	13.287.564.080,00	-12.116.300.600,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	20 Persen	20 Persen	2.047.318.400,00	1.747.435.400,00	-299.883.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	1.647.660.400,00	1.547.606.400,00	-100.054.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	100 Orang	399.658.000,00	199.829.000,00	-199.829.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SESUDAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Seni Budaya	Jumlah Kegiatan Seni Budaya	20 Persen	10 Kegiatan	10.520.982.200,00	10.240.128.680,00	-280.853.520,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	3 Objek	35.000.000,00	34.992.300,00	-7.700,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1 Laporan	10.485.982.200,00	10.205.136.380,00	-280.845.820,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	20 Persen	1 Lembaga Adat	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2 Orang	50 Orang	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	16.66 Persen	16.66 Persen	50.000.000,00	35.808.000,00	-50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SESUDAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat kota	5 Cagar Budaya	42,22 Persen	50.000.000,00	35.808.000,00	-14.192.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	20 Objek	50.000.000,00	35.808.000,00	-14.192.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkatan tipe Museum	Persentase Pertumbuhan Pengunjung Museum	B Tipe	9.79 Persen	2.113.520.400,00	1.878.168.000,00	186.479.600,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum	Jumlah pengunjung museum	5000 Pengunjung	21146 Kunjungan	2.113.520.400,00	1.878.168.000,00	-235.352.400,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	500 Orang	800.000.000,00	600.000.000,00	-200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	293.290.400,00	257.938.000,00	-35.352.400,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1 Unit	760.082.000,00	760.082.000,00	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0014	Pengelolaan Operasional Museum	Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	1 Layanan	3 Layanan	260.148.000,00	260.148.000,00	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip PD Indek Pelayanan Kesekretariatan PD	Nilai Sakip PD Indek Pelayanan Kesekretariatan PD	-	73,53 90,77 Nilai Nilai	19.376.327.447,00	17.401.481.983,00	-2.139.530.647,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SESUDAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu</i>	20 Nilai	100 Persen	8.356.000,00	8.356.000,00	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	2 Dokumen	3.542.400,00	3.542.400,00	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	3 Laporan	4.813.600,00	4.813.600,00	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan</i>	<i>Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan</i>	100 Persen	100 Persen	14.226.528.622,00	12.591.784.374,00	-1.634.744.248,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	71 Orang/b ulan	71 Orang/b ulan	14.161.528.622,00	12.536.284.374,00	-1.625.244.248,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifika si Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifika si Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000,00	55.500.000,00	-9.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya</i>	<i>Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya</i>	100 Persen	100 Persen	82.530.000,00	29.648.000,00	-52.882.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	6 Orang	6 Orang	82.530.000,00	29.648.000,00	-52.882.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SESUDAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</i>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</i>	100 Persen	100 Persen	206.061.325,00	191.925.200,00	-14.136.125,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	59.963.225,00	59.958.400,00	-4.825,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	21.520.300,00	8.415.000,00	-13.105.300,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	39.324.200,00	39.324.200,00	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	3 Dokumen	7.881.600,00	7.881.600,00	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	77.372.000,00	76.346.000,00	-1.026.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</i>	<i>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</i>	100 Persen	100 Persen	602.126.000,00	682.517.248,00	80.391.248,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SESUDAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	490.095.000,00	490.095.000,00	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	12 Unit	112.031.000,00	192.422.248,00	80.391.248,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</i>	<i>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</i>	100 Persen	100 Persen	1.867.777.500,00	1.570.061.161,00	-297.716.339,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	4 Laporan	1.597.800.000,00	1.300.083.661,00	-297.716.339,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	269.977.500,00	269.977.500,00	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</i>	100 Persen	100 Persen	2.382.948.000,00	2.327.190.000,00	-55.758.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	1 Unit	40.780.000,00	38.680.000,00	-2.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SESUDAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	111.310.000,00	92.061.000,00	-19.249.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	56 Unit	87.806.000,00	87.806.000,00	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.143.052.000,00	2.108.643.000,00	-34.409.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.260.112.876,00	8.006.073.071,00	745.960.195,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						7.260.112.876,00	8.006.073.071,00	745.960.195,00	
1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	Persentase destinasi pariwisata yang sesuai standar (Persentase)	1900000 Kunjungan	36,1 persen	1.166.456.200,00	1.081.344.100,00	313.543.800,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	20 Persen	35,96 Persen	554.857.200,00	499.745.100,00	-55.112.100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	9 Lokasi	554.857.200,00	499.745.100,00	-55.112.100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SESUDAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikelola Sesuai Standar</i>	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata	1 Kawasan	36,1 Persen	611.599.000,00	581.599.000,00	-30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	19 Lokasi	539 Lokasi	506.067.000,00	493.567.000,00	-12.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	1 Laporan	12 Laporan	105.532.000,00	88.032.000,00	-17.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah produk pariwisata daerah Jumlah produk pariwisata daerah	Persentase Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan	3 5 Objek Media	57.35 Persen	1.574.918.000,00	1.470.425.200,00	1.725.082.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Destinasi Wisata berkualitas yang dipasarkan</i>	<i>Jumlah Destinasi Wisata berkualitas yang dipasarkan</i>	3 Objek	238 Lokasi	1.574.918.000,00	1.470.425.200,00	-104.492.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	1 Dokumen	3 Dokumen	424.517.100,00	371.131.300,00	-53.385.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	1 Kegiatan	2 Kegiatan	429.804.100,00	420.150.100,00	-9.654.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SESUDAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	1 Promosi	5 Promosi	720.596.800,00	679.143.800,00	-41.453.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	155 2 Orang Subsektor	12.05 Persen	4.518.738.676,00	5.454.303.771,00	-2.518.738.676,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<i>Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif</i>	<i>Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual</i>	20 Persen	48.75 Persen	4.518.738.676,00	5.454.303.771,00	935.565.095,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	1 Laporan	1 Laporan	648.467.300,00	535.416.300,00	-113.051.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	1100 Orang	230 Orang	3.870.271.376,00	4.918.887.471,00	1.048.616.095,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	J U M L A H							42.368.261.323,00	40.609.095.134,00	-1.759.166.189,00	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 - 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD